

ABSTRAK

Politik hukum berkaitan hukum yang berlaku dan hukum yang dicita-citakan dalam suatu Negara tersebut (*ius constituendum*), permasalahan-permasalahan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) diantaranya *pertama*, adanya ketidaksamaan syarat menjadi Notaris dengan Notaris Pengganti, yang mana lebih mudah syarat menjadi Notaris Pengganti, *Kedua*, aturan Pasal 15 ayat (2) huruf f dan g aturan ini tidak pernah diterapkan dan dikerjakan oleh Notaris, dan *ketiga*, aturan mengenai wilayah jabatan Notaris dalam Pasal 18 ayat (2) *jo* Bab VI Honorarium yang masih terlalu dibatasi oleh pemerintah (Negara). Tujuan penulisan ini untuk mengetahui dan menganalisis politik hukum kenotariatan dalam peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) di Negara Kesatuan Republik Indonesia belum terjadi keharmonisan dan akibatnya terhadap para Notaris, untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa politik hukum kenotariatan, untuk mengetahui dan menganalisis harmonisasi politik hukum kenotariatan untuk mewujudkan kesejahteraan para Notaris, dan untuk membuat akta litigasi mengenai pelaksanaan rekonstruksi UUJN agar lebih mewujudkan kesejahteraan bagi para Notaris.

Metode penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yakni data yang diperoleh dari studi kepustakaan, spesifikasi penelitian dilakukan secara *deskriptif analitis*, yaitu cara memaparkan keadaan obyek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat ini. Landasan teori dalam *thesis* ini menggunakan teori *Welfare State* di Indonesia, teori *stufenbau*, teori *utilitarianisme*, teori sibernetika, dan teori kesejahteraan dalam Islam.

Penulisan ini dapat disimpulkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang bukan pejabat ASN, perlu kajian lebih mendalam oleh pemerintah (negara) kedepannya dalam merevisi peraturan-peraturan Notaris, dan UUJN telah *out the date* (ketinggalan zaman) dan apabila terus tidak bisa beradaptasi terhadap perkembangan kehidupan zaman revolusi industri 4.0, maka pekerjaan Notaris bisa tergerus zaman dan digantikan robot/internet.

Kata Kunci : Politik Hukum, Rekonstruksi UUJN, Kesejahteraan.

ABSTRACT

Political law related to the applicable law and the law aspired to in a country (*ius constituendum*), the issues of the Law on the Position of Notary (UUJN) include first, There is an inequality between the requirements to become a Notary Public and a Substitute Notary Public, which makes it easier to become a Substitute Notary Public, *Second*, the rules of Article 15 paragraph (2) letters f and g of this rule have never been applied and implemented by a Notary, and third, rules regarding the office area of a Notary in Article 18 paragraph (2) in conjunction with Chapter VI Honorarium which is still too limited by the government (State). The purpose of this writing to find out and analyze the politics of notary law in the regulations of the Notary Position Law (UUJN) in the Unitary State of the Republic of Indonesia there has been no harmony and its consequences for Notaries, to know and analyze the settlement of political disputes on notary law, to know and analyze the harmonization of political legal notaries for realizing the welfare of the Notaries, and to make a litigation deed regarding the implementation of the reconstruction of the UUJN in order to create more welfare for the Notaries.

This writing method uses the juridical-normative approach, namely legal research which is carried out by examining library materials or secondary data, namely data obtained from literature studies, the research specifications are carried out in a descriptive analytical manner, namely how to describe the state of the object under study based on the facts. actual at this point. The theoretical basis in this thesis uses is the Welfare State theory in Indonesia, Stufenbau theory, utilitarianism theory, cybernetics theory, and welfare theory in Islam.

This writing can be concluded that a Notary is a public official who is not an ASN official, further study is needed by the government (state) in the future in revising Notary regulations, and UUJN has *out the date* (out of date) and if it continues not to be able to adapt to the development of life during the industrial revolution era 4.0, then the work of a Notary can be eroded and replaced by robots / internet.

Keywords : Law Politics, Reconstruction of UUJN, Welfare.